

LAMPIRAN III

Perjanjian Kerja Sama Antara Direktorat Jenderal Pajak,
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan Pemerintah Daerah ...

NOMOR: KEP- /PJ.08/2023

NOMOR: KEP- /PK.5/2023

NOMOR:

FORMAT DAFTAR SASARAN PENGAWASAN BERSAMA

DAFTAR SASARAN PENGAWASAN BERSAMA
KANWIL DJP ... (1)
DAN
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ... (2)
PERIODE S.D. (3)

NO.	NAMA	NPWP	NPWPD	Potensi Pajak Pusat	Potensi Pajak Daerah	KETERANGAN
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.						
2.						
...						

....., (11)

Menyetujui,
a.n. Direktur Jenderal Pajak

a.n. Gubernur/Wali Kota/Bupati
.....(12)

..... (13)

.....(13)

..... (14)
NIP (14)

.....(14)
.....(14)

Tembusan:

- 1. Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan DJP
- 2. Kepala Kanwil DJP ... (15)

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN III

- Angka (1) : Diisi dengan nama Kantor Wilayah DJP.
- Angka (2) : Diisi dengan nama unit Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang melakukan Perjanjian Kerja Sama.
- Angka (3) : Diisi dengan periode waktu pelaporan.
- Angka (4) : Cukup jelas.
- Angka (5) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang menjadi subjek pengawasan bersama.
- Angka (6) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menjadi subjek pengawasan bersama yang telah dilakukan validasi di Kanwil.
- Angka (7) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang menjadi subjek pengawasan bersama.
- Angka (8) : Diisi dengan nilai potensi pajak pusat berdasarkan hasil analisis.
- Angka (9) : Diisi dengan nilai potensi pajak daerah berdasarkan hasil analisis.
- Angka (10) : Diisi keterangan tambahan yang dianggap perlu, misalnya nama Kanwil DJP administrasi dalam hal DSPB juga memuat WP yang tidak terdaftar di Kanwil yang melakukan kerja sama
- Angka (11) : Diisi dengan tempat dan tanggal penyusunan DSPB.
- Angka (12) : Diisi dengan nama unit Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Provinsi yang melakukan Perjanjian Kerja Sama.
- Angka (13) : Diisi dengan jabatan penanda tangan surat.
- Angka (14) : Diisi dengan nama dan NIP penanda tangan surat.
- Angka (15) : Diisi dengan nama Kanwil DJP administrasi dalam hal DSPB juga memuat WP yang tidak terdaftar di Kanwil yang melakukan kerja sama